

Penyaluran Dana Karbon FCPF Dimulai Tahun ini



Sumber gambar :Tribun Kaltim Senin,01/04/2024

SAMARINDA – Tahun 2024 akan menjadi tahun pertama penyaluran dana dari Program *Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund* (FCPF CF) di Kalimantan Timur (Kaltim). Secara nasional, keberhasilan program perdagangan karbon ini menjadi yang pertama di Indonesia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni sangat berharap seluruh tahapan penyaluran dana karbon hingga ke tingkat tapak ini berhasil dan menjadi contoh bagi provinsi lainnya.

“Saya mohon proses ini bisa terus dikawal. Sebab daerah lain saat ini juga sedang menunggu praktik baik dari Kaltim hingga ke tingkat tapak,” kata Sekda Sri Wahyuni saat mewakili Pj Gubernur Kaltim membuka *Kick Off Meeting* dan Sosialisasi Program Penyaluran Dana *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF-CF) di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (28/3/2024).

Sebagai informasi, kompensasi dana karbon dari negara-negara donor disalurkan melalui *World Bank* atau Bank Dunia. Kaltim mendapat tugas menurunkan emisi karbon sebesar 22 juta ton CO₂eq dengan harga per ton USD5. Dengan begitu, Kaltim akan mendapat total dana kompensasi sebesar USD110 juta atau setara Rp1,6 triliun.

Untuk termin pertama, Bank Dunia sudah melakukan pembayaran sebesar USD20,9 juta atau setara Rp313 miliar. Dana tersebut dikoordinasikan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). Sementara Kaltim sendiri mendapat alokasi sebesar Rp69 miliar.

“Dari Rp300 miliar yang masuk APBD Provinsi sebesar Rp69 miliar. Selebihnya itu ke kabupaten dan kota. Karena kita ini yurisdiksi, maka Pemprov tidak sendirian. Ada kabupaten dan kota,” lanjut Sri Wahyuni.

Dia berharap, daerah sebagai penerima manfaat dari program FCPF ini dapat mengawal implementasi seluruh proses penyaluran dana ini dengan baik. Salah satunya dengan melakukan pendampingan dan menyiapkan tenaga-tenaga pendamping hingga ke tingkat tapak.

Diakuinya, implementasi penyaluran program hingga tingkat tapak tidak akan mudah, sebab ini adalah program pertama dan baru. Tapi ia yakin dengan semangat dan kolaborasi yang baik, semua kesulitan bisa diselesaikan dengan baik.

“Dengan semangat dan kolaborasi para pihak di lapangan, saya harap nanti tidak menemui persoalan dan tidak membangun persoalan. Yang kita bangun, bagaimana bersama-sama mencari solusi,” pesan mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu.

Sebagai tindak lanjut, April mendatang akan segera dilakukan pelatihan bagi para calon pendamping yang akan turun ke kabupaten/kota dan desa-desa. Sekda juga berharap seluruh mitra yang terlibat sejak proses awal program ini terus dilibatkan.

“Persoalan di tingkat tapak, teman-teman para mitra itu sudah sangat mahfum. Mulai dari karakter masyarakat, gaya sosial, bagaimana membangun relasi dan hubungan mereka lebih paham. Jadi mereka semua harus dilibatkan,” tambahnya.

Dengan penyaluran dana FCPF ini, Sekda Sri Wahyuni berharap akan terjadi banyak peningkatan. Antara lain dalam hal penyusunan tata ruang desa, pendampingan kampung iklim, pengakuan dan pembinaan masyarakat hukum adat. Artinya, setelah adanya dana FCPF ini akan terjadi peningkatan penetapan masyarakat hukum adat. Di bidang perkebunan juga harus ada peningkatan pembinaan perkebunan berkelanjutan, kelompok tani peduli api, masyarakat peduli api, dan lainnya.

“Kita bersisian dengan IKN (Ibu Kota Nusantara), ini menjadi isu yang sangat sensitif untuk kita meminimalisir potensi risiko kebakaran,” bebernya.

Peningkatan juga harus dilakukan di bidang perikanan dan hutan *mangrove*. Termasuk juga bidang kehutanan untuk perhutanan sosial dan kelompok tani hutan perempuan.

Sementara Direktur Kemitraan BPD LH Laode M Syarief berharap dukungan kabupaten kota dan para mitra yang telah membantu menyelamatkan hutan dan lingkungan di Kaltim selama ini. “Terutama mereka yang telah bekerja lama di tingkat tapak,” kata Laode.

“Mudah-mudahan termin pertama ini kita bisa kerjakan dengan baik. Manfaat ekonomi dana karbon ini bukan hanya dinikmati pemerintah, tapi juga harus dinikmati masyarakat di tingkat tapak. Semoga kepercayaan ini bisa kita tunaikan dengan baik,” harapnya.

Di sela acara juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov Kaltim dan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan oleh Sekda Sri Wahyuni dan

Laode M Syarief. Hadir para kepala OPD terkait, para mitra Pembangunan, LSM dan organisasi kemasyarakatan, DDPI Kaltim, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota. (sul/ky/adv)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Penyaluran Dana Karbon FCPF Dimulai Tahun ini, 01/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca diatur sebagai berikut :
 - (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembagian manfaat dalam program penurunan emisi gas rumah kaca berbasis lahan.
 - (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyalurkan manfaat sesuai mekanisme dan tepat sasaran.
2. Dalam Pasal 30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon diatur sebagai berikut :
 - (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan NEK.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.